

**SKRIPSI**

**PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI  
TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**MUSFIRAH HASAN  
105 73 04417 13**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2017**

**SKRIPSI**

**PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI  
TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**MUSFIRAH HASAN  
10573 04417 13**

*Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi pada Jurusan Akuntansi*

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2017**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI DAN BISNIS**

*Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 91111 Fax : (0411) 860132 Makassar 90121 www.umuhm.ac.id*

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap  
Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten  
Gowa  
Nama : Musfirah Hasan  
Nim : 10573 04417 13  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan Bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan panitia  
penguji Skripsi Strata Satu (SI) pada hari Ahad 08 Oktober 2017 pada Program  
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Makassar

Makassar, 09 Oktober 2017

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. H. Ansvarif Khalid, SE, M.Si, Ak-CA  
NIDN. 0916096601

Pembimbing II,

Faidhul Adzhiem, SE, M.Si  
NIDN. 0921018002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ismail Rasufong, SE, MM  
NBM. 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak-CA  
NBM. 1073428





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI DAN BISNIS




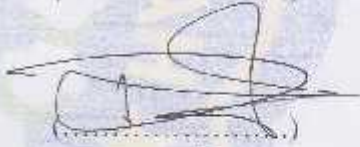



Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar Telp (0411) 500 122 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama Musfirah Hasan, Nim 10530441713 ini Telah Diperiksa dan Diterima Oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor Tahun 1439 H/ 2017 M dan Telah Dipertahankan Didepan Penguji Pada Hari Ahad, 08 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar

Makassar, 18 Muharram 1439 H  
08 Oktober 2017 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM   
(Rektor Unismuh Makassar) (.....)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM   
(Dekan Fakultas Ekonomi) (.....)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM   
(Wakil Dek. IFak. Eknomomi) (.....)
4. Penguji
  - a. Dr. Hj. Ruliaty, MM 
  - b. Andi Arman, SE.,M.Si.,AK.CA 
  - c. Muchriana Muchran, SE.,M.Si.,AK.CA 
  - d. Samsul Rizal, SE.,MM 

## **MOTTO**

*Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat dijadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan dan masa depan adalah cita-citaku. (Kahlil Gibran)*

*Dinilai jelek atau bahkan dijelek-jelekan tidak akan menjadi jelek, jika kita tidak berbuat jelek. Dinilai baik atau bahkan dipuji-puji tidak akan menjadi baik juga, jika tidak berbuat baik. (Yang Mulia Bhante Saddhaviro Maha Thera)*

## **ABSTRAK**

**Musfirah Hasan**, 2017. “Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing: Dr.H.Ansyarif Khalid dan Faidhul Adzhiem.

Populasi penelitian ini adalah kantor bupati kabupaten gowa pada badan pengelola keuangan daerah. Sampel pada penelitian ini diambil dari pegawai badan pengelola keuangan daerah dikantor bupati kabupaten gowa provinsi Sulawesi selatan.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh hasil perilaku organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keperilakuan organisasi berperan untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

**Kata Kunci :Faktor Keperilakuan Organisasi, dan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.**

## **ABSTRAK**

**Musfirah Hasan**, 2017. "The Influence of Organizational Factor Factor on the Use of Regional Financial Accounting System". Essay. Accounting major. Faculty of Economics. University of Muhammadiyah Makassar. Advisor: Dr.H.Ansyarif Khalid and Faidhul Adzhiem.

The population of this research is district gowa regent office at regional finance management board. The sample in this study was taken from the employees of the regional financial management agency at the regent office of gowa district of South Sulawesi province.

Based on the results of t test results obtained organizational behavior has a positive influence on the usefulness of regional financial accounting system. Based on the results of this study can be concluded that the behavior of the organization role to improve the usefulness of regional financial accounting system.

**Keywords: Organizational Behavior Factor, and Usefulness of Regional Financial Accounting System.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat Islam dan Iman dan rahmat serta hidayah-Nya karena sampai detik ini penulis masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Shalawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulis juga haturkan terimah kasih kepada orang tua tercinta yang terus mengucurkan keringat dan air mata cinta di hamparan kasih sayang tanpa kenal lelah dalam mendidik putrinya. Ibuku tercinta Syamsinar, tiada kata terucap untuk membalas kucuran air mata sajadahmu karena kata tak seagung kasihmu. Dan Ayahanda Muh Hasan yang telah membanting tulang hari demi hari tanpa mengenal lelah hanya untuk membiayai kebutuhan putri tercinta.

Seiring berjalannya waktu, hingga akhir karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Penyusunan karya ilmiah ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar



2. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Ismail Badollahi, SE,M.Si,Ak.CA selaku ketua jurusan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
4. Bapak Dr. H. Ansyarif Khalid, SE.,M.Si.Ak.CA selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
5. Bapak Faidhul Adzhiem, SE,M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu kegiatan penulis dan memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan karya ilmiah ini
7. Bapak Mahmud sub bidang penyusunan laporan keuangan, serta seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Bupati Kabupaten Gowa yang telah membantudalam penelitian ini
8. Keluarga besar saya yang selalu memberikan saran dan semangat dalam penyusunan karya ilmiah ini
9. Teman-teman Ak 9.13 yang telah memberikan semangat, dukungan, serta warnadan pengalaman-pengalaman dalam hidup penulis yang tidak bisa terlupakan.

Dengan selesainya penyusunan karya tulis ilmiah ini, tentu penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bernilai ibadah dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya pihak yang menekuni Bidang Akuntansi, serta menjadi sumbangsih yang berharga bagi pengembangan Ilmu Akuntansi.

Makassar, 03Juni 2017

Penulis,

Musfirah Hasan  
105730441713

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A.	Latar Belakang ..... 1
B.	Rumusan Masalah ..... 3
C.	Tujuan Penelitian..... 4
D.	Manfaat Penelitian..... 4
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A.	Perilaku Organisasi..... 5
B.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah..... 10
C.	Penelitian Terdahulu..... 21
D.	Kerangka Pikir..... 31
E.	Hipotesis ..... 31

	F. Pengujian Hipotesis .....	32
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	34
	B. Jenis Dan Sumber Data .....	34
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
	D. Populasi dan Sampel .....	36
	E. Metode Analisis Data .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN</b>	
	A. Sejarah berdirinya Pemerintah Kabupaten Gowa .....	41
	B. Visi, Misi dan Tujuan .....	45
	C. Struktur Organisasi .....	48
	D. Job Description .....	49
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Hasil Kuesioner .....	51
	B. Pembahasan .....	66
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	68
	B. Saran .....	68
	DAFTAR PUSTAKA .....	70
	LAMPIRAN .....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 5.1 Hasil Statistik Deskriptif .....	54
Tabel 5.2 Validitas Instrumen Pertanyaan Perilaku Organisasi.....	56
Tabel 5.3 Validitas Instrumen Pertanyaan SAKD .....	57
Tabel 5.5 Variables Entered/RemovedP .....	62
Tabel 5.6 Model Summary.....	63
Tabel 5.7 Anova .....	64
Tabel 5.8 Coefficients .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kedudukan Akuntansi keuangan daerah.....	14
Gambar 2 Kerangka Pikir.....	31
Gambar 5.1 Normal P-Plot.....	60
Gambar 5.2 Histogram.....	60
Gambar 5.3 ScatterPlot.....	61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang *power share* pada setiap level pemerintahan, serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Pemberian otonomi daerah pada kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas.

Sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah diatur dengan peraturan menteri keuangan yaitu PMK no.59/PMK.06/2005 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, maka sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan Pemendagri No.59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah perubahan atas Permendagri No.13 tahun 2006 yaitu pada pasal 232 yang mengatur tentang sistem akuntansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.



Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah lemah akan menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah meliputi: *validity*, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi. *Reliability*, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya. Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya dan kegunaan SAKD selanjutnya adalah efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal (Carolin, 2009). Agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD ini maka perlu adanya faktor perilaku dalam suatu organisasi yang mendukung dalam penerapan SAKD tersebut (Latifah, 2007).

Kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki (Latifah dan Sabeni, 2007). Dukungan atasan berpengaruh dalam mendukung suksesnya implementasi sistem baru. Menurut Shield (1995) dalam Latifah dan Sabeni (2007) dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya.

Berdasarkan hasil penelitian Fung jen (2002) dalam Dewi (2011) diperoleh hasil bahwa pada perusahaan yang memiliki program pelatihan dan pendidikan pengguna terdapat perbedaan yang signifikan dengan kepuasan pengguna tetapi tidak terbukti adanya perbedaan pengguna sistem.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Nurlaela dan Rahmawati (2010) dengan judul Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Perbedaan dari penelitian adalah pada jumlah variabel dan cakupan wilayah. Peneliti hanya fokus pada tiga variabel yang mencakup Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan dan Pelatihan serta tidak melibatkan konflik Kognitif dan Efektif yang telah disebutkan oleh peneliti sebelumnya serta penelitian sebelumnya meneliti di Subokawonosraten. Sedangkan penelitian ini hanya pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA ( Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka peneliti merumuskan permasalahan, yaitu apakah Faktor Perilaku Organisasi berpengaruh Terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah Kabupaten Gowa.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis “Pengaruh Faktor Perilaku Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.”

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Penulis

Dapat dijadikan sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian dengan mengaplikasikan teori yang sudah di terima selama studi diperguruan tinggi.

#### 2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan mengenai sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang saat ini ditetapkan.

#### 3. Bagi Pembaca

Dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perilaku Organisasi**

##### **1. Pengertian Perilaku Organisasi**

Perilaku organisasi pada hakikatnya mendasarkan pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Bidang pengetahuan perilaku organisasi yang sudah dikembangkan sejak lama, nampak akhir-akhir ini mulai dirasakan kepentingannya. Perilaku organisasi merupakan bidang ilmu terapan yang dibentuk berdasarkan kontribusi dari sejumlah bidang yang berkaitan dengan perilaku.

Adapun pengertian perilaku organisasi yang dikemukakan oleh Kelly dalam Thoha (2014:9) “perilaku organisasi merupakan sebagai suatu sistem studi dari sifat organisasi seperti misalnya bagaimana organisasi dimulai, tumbuh dan berkembang dan bagaimana pengaruh terhadap anggota-anggota sebagai individu, kelompok-kelompok pemilih, organisasi-organisasi lainnya dan institusi-institusi yang lebih besar.

Menurut Robbins (2007:10), Perilaku organisasi adalah “suatu bidang studi yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut dengan perbaikan efektivitas organisasi”.

Thoha (2014:5) “perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu”.

Dari pendapat diatas dapat dikemukakan bahwa perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi dan sebuah bidang keahlian khusus yang mempunyai pokok ilmu pengetahuan yang umum.

Faktor organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Faktor-faktor tersebut didefinisikan sebagai berikut (Chenhall, 2004 dalam Nurlaela dan Rahmawati 2010).

## 2. Fungsi Tujuan Organisasi

Terdapat beberapa fungsi tujuan organisasi, antara lain:

### a. Pedoman bagi kegiatan

Ini dilakukan melalui penggambaran hasil-hasil diwaktu yang akan datang. Fungsi tujuan memberikan arah dan permusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan.

### b. Sumber legitimasi

Ini akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan di sekitarnya.

### c. Standar pelaksanaan

Bila tujuan dilaksanakan secara jelas dan dipahami, ini dapat memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan (prestasi) organisasi.

d. Standar motivasi

Ini berfungsi sebagai motivasi dan identifikasi karyawan yang penting. Pada kenyataannya tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi para anggota.

e. Dasar rasional pengorganisasian

Tujuan organisasi merupakan suatu dasar perancangan organisasi

f. Ciri-ciri Organisasi

Adapun ciri-ciri suatu organisasi adalah sebagai berikut.

1. Lembaga sosial yang terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan.
2. Dikembangkan untuk mencapai tujuan
3. Secara sadar dikoordinasikan dan dengan sengaja disusun
4. Instrumen sosial yang mempunyai batasan yang secara relatif dapat diidentifikasi

g. Karakteristik Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Individu

Karakteristik organisasi adalah ciri khusus yang dimiliki oleh suatu organisasi tertentu, misalnya:

1. Terdapat komunikasi dua arah
2. Tujuan kelompok jelas dan diterima oleh anggota
3. Kontroversi dan konflik tidak diabaikan, diingkari atau ditekan.

Namun, karakteristik organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku individu. Hanya saja, perilaku individu itu akan menyesuaikan dengan karakteristik organisasi tersebut, yaitu berupa peraturan-peraturan. Hal itu hanya berlaku ketika individu tersebut berada di lingkungan organisasi. Namun, tidak dapat di pungkiri juga bahwa hal itu akan berdampak pada perilaku di lingkungan luar, misalnya keluarga dan masyarakat, yaitu sikap yang sering dilakukan individu dalam organisasi seperti cara berpikir, berbicara dan mengambil keputusan serta gaya atau cara ia dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul.

h. Prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam perilaku organisasi

Perilaku organisasi hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku organisasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Salah satu cara untuk memahami sifat-sifat manusia ialah dengan menganalisis prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian daripadanya. Menurut Thoha (2014:36) bahwa terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain :

1. Manusia berbeda perilakunya, karena kemampuannya tidak sama. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda.
2. Orang berpikir tentang masa depan, dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak.



3. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya.
4. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang.
5. Banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang.

Larry L. Cummings, (Dalam Thoha, 2007:7) Presiden dari Akademi Manajemen di Amerika Serikat memberikan suatu analisa perbedaan antara perilaku organisasi dengan disiplin lain yang erat hubungannya dengan ilmu perilaku. Menurut Cummings perbedaan yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Perbedaan antara perilaku organisasi dengan psikologi organisasi antara lain: psikologi organisasi membatasi konstruksi penjelasannya pada tingkat psikologi saja, akan tetapi perilaku organisasikonstruksi penjelasannya berasal dari mulsti disiplin.
- b. Kesamaan keduanya ialah kedua bidang tersebut menjelaskan perilaku orang-orang di dalam suatu organisasi.
- c. Perbedaan antara perilaku organisasi dengan teori organisasi didasarkan pada dua perbedaan antaranya unit analisisnya dan pusat variabel tak bebas. Perilaku organisasi dirumuskan sebagai suatu studi dari tingkah laku individu dan kelompok didalam suatu organisasi dan penerapan dari ilmu pengetahuan tertentu.
- d. Perbedaan antara perilaku organisasi dengan *Personnel* dan *Human Resourcer* adalah bahwa perilaku organisasi lebih menekankan pada

orientasi konsep, sedangkan *Personnel* dan *Human Resourcer* (P&HR) menekankan pada teknik dan teknologi.

i. Perilaku Individu dalam Organisasi

Menurut David A.Nadler (1970) sebagaimana dikemukakan oleh Anoraga (1995:54) dan Thoha (2007:33) bahwa perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari integrasi antara person atau individu dengan lingkungannya.

Ungkapan pengertian diatas dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut:

$$P = F(I,L)$$

Keterangan :

P : Perilaku

F : Fungsi

I : Individu

L : Lingkungan.

Ungkapan tersebut dapat dibaca sebagai berikut :

“Perilaku adalah suatu fungsi dari integrasi antara seorang individu dengan lingkungannya”

## **B. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

### 1. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Elina (2013:6) “sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)”.

Abdul (2007:43) “sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi, (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Deddi (2010:201) dan Permendagri No.13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah “sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara manual.

## 2. Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Adapun tujuan dari akuntansi pemerintahan menurut Nurlan (2008:28) mengatakan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan adalah:

### a. Pertanggungjawaban

Memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang

bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.

b. Manajerial

Akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.

c. Pengawasan

Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

3. Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

Erlina (2013:2) mengatakan secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik.

Menurut Erlina (2013:2) mengemukakan bahwa akuntansi terdiri dari 2 bidang utama, yaitu:

a. Akuntansi Komersial Perusahaan

Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanaman modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan penetapan pajak. Akuntansi komersial perusahaan adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa

ekonomi pada entitas bisnis (perusahaan) yang mencari keuntungan atau laba.

b. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik atau lebih dikenal dengan standar akuntansi pemerintahan.

Akuntansi sektor publik dibagi atas :

1. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintah dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah perlu mengatur standar akuntansi pemerintahan daerah agar dapat digunakan secara seragam diseluruh pemerintah daerah.

2. Akuntansi Sosial

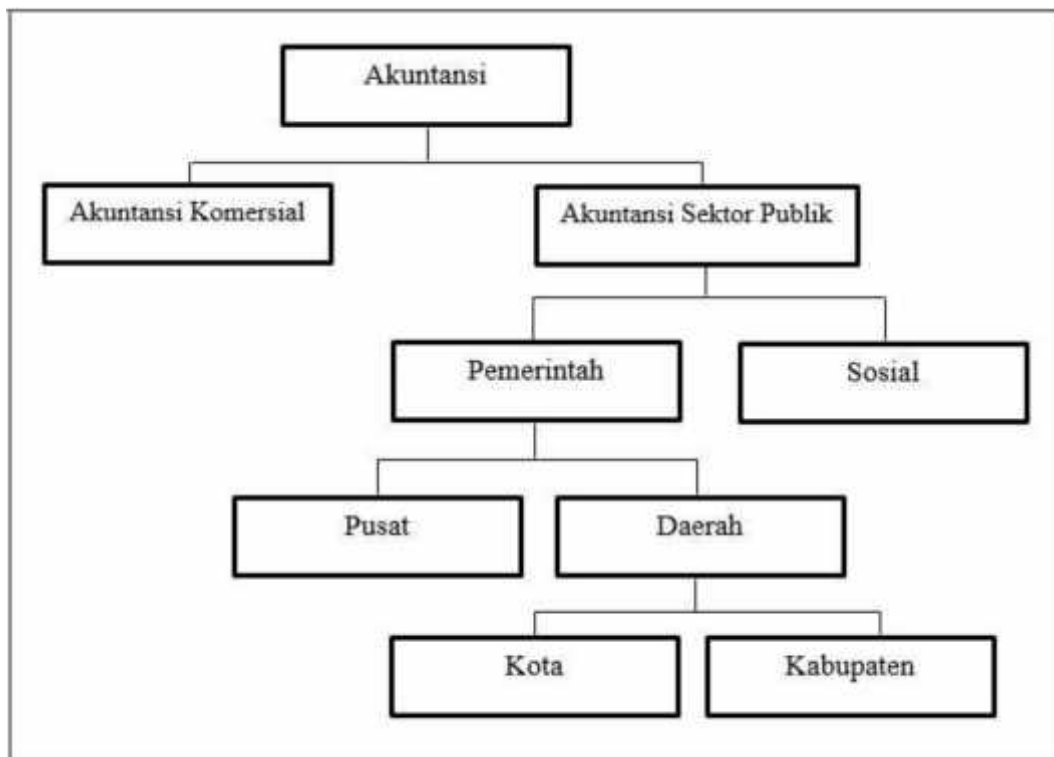
Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada

organisasi non profit atau nirlaba. Akuntansi ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan klasifikasi di atas, kedudukan akuntansi keuangan daerah dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:

Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

Gambar 1  
Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah



Sumber: Erlina Rasdianto (2013:4)

#### 4. Sistem Pencatatan

Menurut Erlina (2013:4) mengatakan bahwa akuntansi keuangan daerah terdapat proses pencatatan, pengidentifikasian, dan

pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Menurut Erlina (2013:4) dalam proses pencatatan yang merupakan salah satu proses akuntansi, akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Menurut Erlina Rasdianto (2013:4) Ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu:

- a. *Single entry*
- b. *Double entry*
- c. *Triple entry*

Adapun penjelasan sistem pencatatan yaitu sebagai berikut:

1. *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* disebut dengan sistem tata buku tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat disisi penerimaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat kurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum. *Single entry* ini disebut dengan pembukuan, sedangkan dalam akuntansi sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem *double entry* atau *triple entry*.

2. *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* disebut sistem tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap Pencatatan harus menjaga keseimbangan antara



sisidebit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem *double entry* sering disebut dengan istilah menjurnal. Pada masa sebelum reformasi, sistem pencatatan yang dilakukan oleh akuntansi keuangan daerah adalah sistem tata buku tunggal (*single entry*). Tetapi setelah reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105/2000, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem pencatatan *double entry*.

### 3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah sistem pencatatan yang menggunakan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada *double entry*. Dengan adanya pencatatan ini maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapatan belanja daerah. Pencatatan dengan sistem *triple entry* ini dilaksanakan saat pencatatan *double entry* dilaksanakan, maka sub bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*) artinya bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit.

## 5. Pembiayaan Daerah

### a. Penerimaan pembiayaan

Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.

Ketentuan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah diatur dengan peraturan pemerintah, yang sekurang-kurangnya mengatur tentang:

1. Persyaratan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman;
  2. Penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam APBD;
  3. Pengenaan sanksi dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga perbankan, serta lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat;
  4. Tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan
  5. Penerbitan obligasi daerah, pembayaran bunga dan pokok obligasi;
  6. Pengelolaan obligasi daerah mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi, pelunasan dan penganggaran dalam APBD pasal(171).
- b. Pengeluaran pembiayaan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu

tahun anggaran, yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah, yang sekurang-kurangnya mengatur persyaratan pembentukan dana cadangan, serta pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

c. Pertanggungjawaban keuangan Daerah

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib, menyampaikan pertanggungjawabannya berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran,
2. Neraca,
3. Laporan Arus Kas, dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Basis Akuntansi yang digunakan di sektor pemerintahan

Pada tahun 2010, untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (*accrual*) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

e. Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAP 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, maupun politik, yaitu sebagai berikut.

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

f. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Lingkungan akuntansi pemerintahan sebagaimana diuraikan sebelumnya mempengaruhi karakteristik akuntansi pemerintahan.

Menurut *A Guide to Accounting, Financial Reporting, and Auditing in Federal Government*, ciri-ciri akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut.

- a. Tidak terdapat pencatatan laba-rugi karena tujuan utama lembaga pemerintah bukanlah mencari laba.
- b. Tidak perlu dilakukan pencatatan pemilikan pribadi karena lembaga pemerintah adalah milik seluruh rakyat, dan kepemilikan itu tidak dituliskan dalam sebuah surat bukti kepemilikan.

### C. Penelitian Terdahulu

Tabel. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Variabel Dependen	Metode Analisis	Hasil	Sumber Referensi
1.	Rheny Afriana Hanif , R. Adri Satriawan danTriyanto Hadi Saputra(2014)	Pengaruh keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan rumah sakit dengan konflik kognitif dan afektif sebagai variabel intervening (studi pada rumah sakit pemerintah di	Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit	Metode regresi berganda	Hasil penelitian bahwa hanya konflik afektif mampu menjadi penyela hubungan berperilaku organisasi dan kegunaan sistem akuntansi keuangan rumah sakit	Karyawan, p. K., & pekanbaru, s. W. (2014). Jurnal ekonomi Volume 22, Nomor 2 Juni 2014, 22, 138–150.

		kota pekan baru)				
2	Muji Mranani Beti Lesti orini(2011)	Faktor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi Keuangan daerah dengan konflik kognitif dan konflik afektif sebagai <i>Intervening</i>		Metode regresi berganda	Semua instrument memiliki nilai korelasi dengan <i>Sig.(2-tailed)</i> signifikan di bawah 0,01 dengan nilai hitung positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh butir instrumen valid, sehingga semua instrument dapat diikutsertakan dalam uji lanjutan.	Organisasi, F. P., Kognitif, K., Konflik, A., & Akuntansi, S. (2011). Faktor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan konflik kognitif dan konflik afektif sebagai, <i>10(3)</i> , 193–203.
3	Dewi Andini, Yusrawati (2015)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan system	Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan	Regresi linier berganda	Hasil dari penelitian ini kompetensi SDM dan penerapan system akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan	Andini, D., & Yusrawati. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan

		Akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan Keuangan daerah Pada satuan kerja perangkat daerah (skpd) kabupaten empat lawing Sumatera selatan	Daerah		Keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Empat Lawang	Keuangan Daerah. <i>Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akutansi</i> , 24(Juni 2015), 65–82.
4	Akhmad notowardoyo (2012)	Pengaruh keperilakuan organisasi terhadap kegunaan system akuntansi keuangan daerah Di kabupaten boyolali	kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitiannya menunjukkan konflik afektif berhubungan positif terhadap kegunaan system akuntansi keuangan daerah, hal ini dikarenakan bahwa konflik afektif pada pegawai dapat memperlambat komunikasi dan proses kognitif, mengurangi kekohesifan kelompok dalam menerima ide baru, dan usaha saling	Boyolali, D. I. K., & Wardoyo, A. N. (2012). Pengaruh keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di kabupaten boyolali.



					menjatuhkan diantara anggota tim sehingga dapat menghambat kesuksesan	
5	Shoffiyatuzzahro (2014)	Pengaruh factor keperilakuan organisasi dalam implementasi system akuntansi keuangan daerah ( studi kasus instansi pemerintah se-kota madiun)	Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan implikasi yang luas dimasa yang akan datang, khususnya untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hubungan factor perilaku dalam implementasi inovasi system. Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan suatu gambaran kepada Pemerintah Daerah bahwa kesuksesan implementasi system tidak hanya ditentukan oleh factor teknis dan dana, namun factor perilaku dari pengguna juga perlu diperhatikan.	Surakarta, U. M., & Keuangan, S. A. (n.d.). Pengaruh faktor keperilakuan organisasi dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.
6	Cyntia	Pengaruh kejelasan tujuan	Kegunaan	Regresi	Menunjukkan bahwa Kejelasan	September, W. P. (2013). Wisuda Periode September

	Carolina (2013)	dan dukungan atasan terhadap kegunaan system akuntansi keuangan daerah (pada dinas di pemerintah kota padang)	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Linear Berganda	Tujuan berpengaruh signifikan positif terhadap Kegunaan SAKD. Semakin tinggi Kejelasan Tujuan maka Kegunaan SAKD juga akan semakin tinggi	2013, (September).
7	Dra. SitiNurlaela, SE., M.Si.,Ak. Dan Prof. Dr. Rahmawati, M.Si., Ak (2010)	Pengaruh factor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan system akuntansi keuangan daerah di subosukawonosraten	Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah	Regresi Linear Sederhana	Menunjukkan bahwa factor organisasional yang diuji, Pengaruh pelatihan dan kejelasan tujuan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berhasil dibuktikan. Konflik	Nurlaela, S., & Rahmawati. (2010). Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Subosukawonosraten. <i>Simposium Nasional Akuntansi XIII</i> .
8	Juwita R. (2013)	Pengaruh Implementasi		Regresi Linear	Menunjukkan Bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan	Juwita, R. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi

		Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan		Berganda	berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP)	Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. <i>Trikonomika</i> , 12(2), 201–214.
9	Wildoms Sahusilawane (2016)	Pengaruh pelatihan dan kejelasan tujuan dalam penggunaan system informasi keuangan daerah	Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah	Regresi Linear Berganda	Menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Sahusilawane, W. (2017). Pengaruh Pelatihan Dan Kejelasan Tujuan Dalam Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Kasp. <i>Jurnal Organisasi Dan</i>

						<i>Manajemen, (59).</i>
10	Sang Ayu Nyoman Trisna Dewi, AANB Dwirandra (2013)	Pengaruh dukungan manajemen puncak, kualitas sistem, kualitas informasi, pengguna actual dan kepuasan pengguna terhadap implementasi system informasikeuanga ndaerah di kotadenpasar		Regresi Linear Berganda	Menunjukkan bahwa keterlibatan manajemen puncak, motivasi, dan perhatian manajemen puncak akan meningkatkan pengguna untuk menggunakan sistem yang ada dan berhasil mengimplementasikan system informasi keuangan daerah.	Sistem, K., Informasi, K., Dan, A., & Pengguna, K. (2013). Sang Ayu Nyoman Trisna Dewi 1 Fakultas Ekonomi Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional bertujuan untuk percepatan trans, 1, 196–214.
11	Andira dewanti (2015)	Pengaruh faktor keperilakuan organisasi	Sistem Akuntansi keuangan	Regresi linear berganda	Kejelasan tujuan, dukungan atasan dan pelatihan sangat berpengaruh pada sistem akuntansi keuangan	<a href="http://eprints.ums.ac.id/38835/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf">http://eprints.ums.ac.id/38835/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf</a>

		terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di kabupaten ngawi	daerah		daerah.	
12	Himmah bandariy (2011)	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas)	Akuntansi keuangan daerah	Regresi linear berganda	Fungsi laporan keuangan daerah yaitu untuk menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan informasi-informasi terkait lainnya sebagai alat ukur kinerja manajemen di pemerintah daerah yang kemudian dinilai oleh pengguna informasi laporan keuangan	<a href="http://eprints.undip.ac.id/30992/1/Skripsi019.pdf">http://eprints.undip.ac.id/30992/1/Skripsi019.pdf</a>

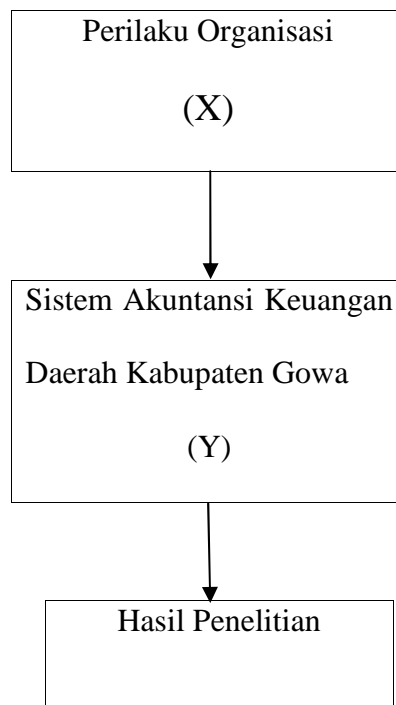
13	Ani Khubiyati, Johan Arifin (2016)	Analisis pengaruh faktor institusional terhadap minat adopsi sistem informasi akuntansi keuangan daerah yogyakarta	Akuntansi keuangan daerah	Regresi linear berganda	Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh faktor institusional yang terdiri dari faktor mimetic, normative, coercive dan juga pengaruh tekanan mimetic yang dimoderasi oleh kompleksitas sistem terhadap minat Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengadopsi software SIAKD yang dikembangkan oleh Pemerintah pusat	<a href="http://gondata.feb.unila.ac.id/gallery/wp-content/uploads/2016/08/SIPE-081-Camera-ready-Fullpaper-Edit-Revisi-Final-Paper-SNA2016-Ani-Khubiyati.pdf">http://gondata.feb.unila.ac.id/gallery/wp-content/uploads/2016/08/SIPE-081-Camera-ready-Fullpaper-Edit-Revisi-Final-Paper-SNA2016-Ani-Khubiyati.pdf</a>
14	Rahmad Hidayat (2015)	Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (studi	Akuntansi keuangan daerah	Regresi linear berganda	Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.	<a href="http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/1624/1247">http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/1624/1247</a>

		empiris pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten padang pariaman)				
15	Usman, s.pd.,se., msi Lukman Pakaya,s.pd.,msa (2014)	Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja skpd pada pemerintah daerah kabupaten bone bolango	Akuntansi keuangan daerah	Regresi linear berganda	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan membuktikan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja SKPD pada pemerintah daerah kabupaten bone bolango	file:///C:/Users/asus/Downloads/pengaruh-pemahaman-sistem-akuntansi-keuangan-daerah-terhadap-kinerja-keuanganpemerintah-daerah-kabupaten-bone-bolango.pdf

Sumber:Penelitian 2017

#### D. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Perilaku Organisasi berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar. 2 Kerangka Pikir

#### E. Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran. Menurut Sugiyono (2013:99) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana urusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.



Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan penulis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah faktor keperilaku organisasi berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

#### **F. Pengujian Hipotesis**

1. Hipotesis diterima jika nilai *p value* pada kolom *significant* lebih besar dari *level of significant* ( ) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  yang menunjukkan perilaku organisasi berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah kabupaten gowa.
2. Hipotesis diterima jika nilai *p value* pada kolom *significant* lebih kecil dari *level of significant* ( ) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  yang menunjukkan perilaku organisasi berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah kabupaten gowa.

#### 3. Pengujian Instrumen Penelitian

Kuesioner penelitian sebagai instrumen penelitian adalah teknik kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dari para responden yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner penelitian disusun dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun menurut indikator-indikator penelitian yang diperoleh dari pengembangan hasil kajian pustaka. Penyusunan kuesioner menggunakan Skala Likert. Sugiyono (2012:73) menjelaskan :

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala

Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata antara lain :

1. Sangat setuju
2. Setuju
3. Kurang setuju
4. Tidak setuju
5. Sangat tidak setuju

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kantor Bupati Kabupaten Gowa yang beralamat di Jalan Masjid Raya No. 30 Sungguminasa, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92114 Telepon:(0411) 862261. Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan mulai dari tanggal 19 April sampai dengan tanggal 10 Mei 2017.

##### **B. Jenis dan Sumber Data**

###### 1. Jenis Data

- a. Data Kualitatif , yaitu data yang berupa pendapat atau *judgment* sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata atau kalimat.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau bilangan.

###### 2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil observasi dan wawancara
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari hasil kuesioner responden.

##### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka panulis menggunakan metode sebagai berikut.

- a. Metode kepustakaan (*Library Research*)

Metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengutip dari buku – buku yang ada kaitannya dengan obyek yang sedang diteliti oleh penulis.

b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian lapang adalah metode yang dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang di hadapi dengan cara :

1. Metode Pengamatan (*Observasi*)

Metode pengamatan adalah pencatatan secara langsung dan sistematis dari obyek penelitian untuk memperoleh gambaran nyata kegiatan perusahaan.

2. Metode Wawancara

Metode Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan pihak yang bersangkutan.

3. Metode kuesioner

Adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

c. Studi Internet

Sehubungan dengan adanya keterbatasan sumber referensi dari perpustakaan yang ada, maka penulis juga melakukan penelusuran

guna mendapatkan referensi yang terpercaya pada situs-situs terkait guna memperoleh tambahan literatur atau data relevan, terpercaya lainnya yang dibutuhkan.

#### **D. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi dapat didefinisikan sebagai kelompok elemen yang lengkap, dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2009:53), sedang menurut Sugiyono (2013:117) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

##### **2. Sampel**

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi, 2006:131). Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:118). Sampel yang diambil mewakili dan diberlakukan untuk populasi, untuk itu sampel tersebut harus betul-betul *representativ* (mewakili).

Menurut Kuncoro, (2009:53), Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi. Sampel pada penelitian ini diambil dari Pegawai yang mempunyai kewenangan bagian keuangan pada Kantor Bupati

Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah sampel yang diambil yang sesuai kriteria yang sudah ditetapkan pada Pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 32 orang.

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik kuantitatif.

Adapun metode analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Kuantitatif

Analisis data dimaksudkan untuk memahami apa yang terdapat dibalik semua data tersebut, mengelompokannya, meringkasnya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti, serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut. Dalam menganalisa data penelitian strukturalistik (kuantitatif) hendaknya konsisten dengan paradigma, teori dan metode yang dipakai dalam penelitian.

2. Analisis Regresi Linear Sederhana (*Simple Linear Regression*)

Regresi Linear Sederhana adalah Metode Statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara Variabel Faktor Penyebab (X) terhadap Variabel Akibatnya. Faktor Penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan Predictor sedangkan Variabel Akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan Response. Regresi Linear Sederhana atau sering disingkat dengan SLR (*Simple Linear Regression*) juga merupakan

salah satu Metode Statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun Kuantitas.

Model Persamaan Regresi Linear Sederhana adalah seperti berikut ini:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependent)

X = Variabel Predictor atau Variabel Faktor Penyebab  
(Independent)

a = konstanta

b = koefisien regresi (kemiringan); besaran Response yang ditimbulkan oleh Predictor.

Nilai-nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan Rumus dibawah ini :

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

### 3. Analisis Korelasi

Untuk mengetahui nilai korelasi Jika nilai r berada diantara -1 dengan > 1. Untuk mendapatkan nilai analisis korelasi maka

pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program *SPSS* versi 16.

#### 4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel *dependen* dalam output *SPSS*. Koefisien determinasi terletak pada tabel *Model Summary* dan tertulis *R Square* (Nugroho,2005:50).

#### 5. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan variabel. Validitas suatu pertanyaan dapat dilihat pada hasil output *Statistical Program Social Scinces (SPSS)* pada table dengan judul item – total statistics. Menilai kevalidan masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat dari jika nilai *Corrected Item Total Correlation*  $> 0,30$ . Masing-masing butir pertanyaan.Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika ada  $r_{hitung}$  yang merupakan nilai dari *Corrected ItemTotal Correlation* lebih besar dari  $r_{table}$  (Nugroho 2005:67).

#### 6. Uji Reliabilitas

Uji realibilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan daftar-daftar pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Realibilitas suatu



variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6 (Nugroho,2005:72).

7. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y).Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan).

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya Pemerintah Kabupaten Gowa

Sistem kekuasaan yang berhubungan dengan pemilikan tanah lebih jelas lagi terlihat dalam surat pemerintahan kerajaan. Dalam uraian kesejarahan, kita dapat melihat bahwa gelar kebangsawanan selalu dihubungkan dengan nama negeri tertentu. Dalam kehidupan adat feodelisme masyarakat Makassar terdapat dua macam kepemimpinan. Kepemimpinan yang pertama disebut *Pamminawangang Tojeng* yang dapat diterjemahkan sebagai *kepemimpinan murni*. Kepemimpinan kedua diberi nama *Pamminawangngang Tunipinawang* yang dapat diterjemahkan sebagai *Kepemimpinan Penguasa*. Kepemimpinan *Tojeng* terdapat di Desa-desa , menurunkan pula gelar-gelar yang berbeda-beda menurut sejarah desa masing-masing. sedangkan Kepemimpinan *Tunipinawang* berkembang di pusat pemerintahan kerajaan. Kerajaan Gowa pada fase terakhir perkembangannya digambarkan sebagai berikut :

- 1). Gallarang, seperti gallarang Mangasa, Gallarang Tombolo

Pada tanggal 31 Desember 1906, Gubernur Celebes dan daerah takluknya mengeluarkan surat keputusan No. 6041/2 , yang kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 30 Maret 1907 No. 16, untuk menetapkan wilayah Gowa Barat. Daerah ini meliputi distrik-distrik : Jongaya, Borisallo,

Manuju, Pattallasang, dan Paccelokang. Daerah ini dipimpin oleh seorang Pamongpraja Belanda, yaitu Controluer yang berkedudukan di Pandang-Pandang.

Pada Tanggal 01 Juli 1926 dibentuklah oleh pemerintah Belanda sebuah pemerintahan yang disebut Federasi Gowa, yang memiliki perlengkapan dan anggaran rumah tangga sendiri. Lembaga ini merupakan suatu langkah untuk merehabilitir Gowa kembali sebagai sebuah kerajaan seperti sebelum tahun 1906.

Susunan Pemerintahan di Gowa pada Tahun 1935 adalah sebagai berikut :

- a. Onderafdeling Gowa di kepalai oleh seorang Controleur dibantu oleh seorang aspirant controleur dan tiga orang Pamongpraja Bumi Putra.
- b. Federasi Gowa diketuai oleh ***I Tjoneng Daeng Mattajang Karaeng Mandjalling.***
- c. Tiga Belas Adatgemeenschap :
  - 1). Mangasa dikepalai oleh seorang Gallarang
  - 2). Tombolo dikepalai oleh seorang Gallarang
  - 3). Borongloe dikepalai oleh seorang Gallarang
  - 4). Karuwisi dikepalai oleh seorang Karaeng
  - 5). Pattallassang dikepalai oleh seorang Karaeng
  - 6). Borisallo dikepalai oleh seorang Karaeng
  - 7). Parigi dikepalai oleh seorang Karaeng
  - 8). Manuju dikepalai oleh seorang Karaeng
  - 9). Bontonompo dikepalai oleh seorang Karaeng
  - 10). Limbung dikepalai oleh seorang Nulbestuur Assistant

- 11). Malakaji dikepalai oleh seorang Bestuur Assistant
- 12). Pao dikepalai oleh seorang Arung
- 13). Kindang dikepalai oleh seorang Karaeng

Untuk mendampingi Raja Gowa oleh Residen Celebes Selatan diangkat dua orang pejabat tinggi kerajaan :

1. *I Pabisei Daeng Paguling Karaeng Kapatang* sebagai Tumailalang Towa.
2. *I Tjoneng Daeng Mattojeng Karaeng Mandjalling* sebagai Tumailalang Lolo.

Pada tahun 1946, Raja Gowa *I Mangngimangi Karaeng Bontonompo* wafat lalu digantikan oleh putranya yang bernama *Andi Idjo Karaeng Lalolang* dengan gelar Sultan Muhammad Abdulkadir Aididdin. Pelantikan Raja inipun harus disertai dengan penandatanganan perjanjian bersama pemerintah Hindia Belanda seperti apa yang telah dilakukan oleh Ayahandanya. Untuk membantu melaksanakan pemerintahan, oleh residen Celebes Selatan diangkat pejabat-pejabat tinggi kerajaan, yakni :

- 1). *Andi Baso Daeng Rani Karaeng Bontolangkasa* menjadi Pabbicara butta.
- 2). *Andi Manrurungi Daeng Muang Karaeng Sumanna* sebagai tumailalang towa,
- 3). *Andi Laodanriu Bontonompo* sebagai Tukkajannangang.
- 4). *Andi Mappasiling Daeng Ngeppo Karaeng Sapanang* sebagai tumailalang lolo.
- 5). *Hamzah Daeng Tompo Gallarang Borongloe* sebagai Paccallaya.

Dengan melihat bahwa dalam kehidupan adapt dan feodalisme masyarakat Makassar terdapat dua macam kepemimpinan. Kepemimpinan pertama disebutnya *Pamminawangngang tojeng* (Kepemimpinan murni) terdapat di desa-

desa. Kepemimpinan kedua diberi nama *Pamminawangngang tunipinawang* (Penguasa) berkembang di pusat pemerintahan kerajaan.

Gelar penguasa desa terdapat dalam lingkungan Kerajaan Gowa pada fase terakhir perkembangannya, sebagai berikut :

1. *gallarang*, seperti *gallarang Mangasa, gallarang tombolo, dsb.*
2. *anrongguru*, seperti *anrongguru Lembangang, anrongguru Moncobalang, dsb.*
3. *daeng*, seperti *daeng pallangga, daeng paku.*
4. *batang banoa*, seperti *batang banoa Bajeng, batang banoa Pammase.*
5. *jannang*, seperti *jannang Gentungan, jannang Data, dsb.*
6. *aruk*, seperti *aruk Pao.*

Adapun Wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa dalam periode ini, sama dengan wilayah Kabupaten Gowa sebelum Kepres 19/1069 tentang perluasan Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.

*Andi Idjo Karaeng Lalolang* menjadi kepala daerah Gowa pertama dengan surat keputusan Menteri Dalam negeri Tanggal 16 Februari 1957, No. 7/2/24, dengan resmi diangkat menjadi Kepala Daerah Gowa, Pamongpraja atau pegawai negeri dalam struktur pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam masa pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT), dari tahun 1946 sampai tahun 1950, Kerajaan Gowa termasuk anggota dari pemerintahan gabungan Celebes Selatan yang dibentuk oleh NIT. Raja Gowa yang menjadi kepala Pemerintahan negeri di Gowa. *Andi Idjo Karaeng Lalolang* sebagai ketua Hadat

Tinggi Celebes Selatan keluar dari ikatan ketatanegaraan NIT dan bergabung ke dalam pemerintahan Republik Indonesia Yogyakarta pada tanggal 26 April 1950.

Akhir dari fase transisi ini terjadi ketika Gowa yang merupakan daerah swapraja yang bergabung dalam pemerintahan *afdeling* Makassar meminta untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonom.

## **B. Visi, Misi dan Tujuan**

### 1. Visi

- a. ***Berkualitas***, mengandung makna sebagai kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, religious dan bermartabat sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial ekonominya secara inklusif. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, terpenuhinya hak-hak anak, dan meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius.
- b. ***Mandiri***, dimaknakan sebagai kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya pengembangan potensi sumberdaya alam lokal dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- c. ***Berdayasaing***, dimaknakan sebagai kondisi daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Kondisi

tersebut ditandai dengan meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur, terkendalinya pemanfaatan ruang, meningkatnya kualitas kawasan permukiman, meningkatnya kapasitas pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, meningkatnya pengelolaan kawasan, dan meningkatnya kualitas lingkungan.

- d. *Tata kelola pemerintahan yang baik*, dimaknakan sebagai kondisi pemerintahan yang inovatif dalam penyelenggara Antara kelola pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta terselenggaranya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan demokratis.

## 2. Misi

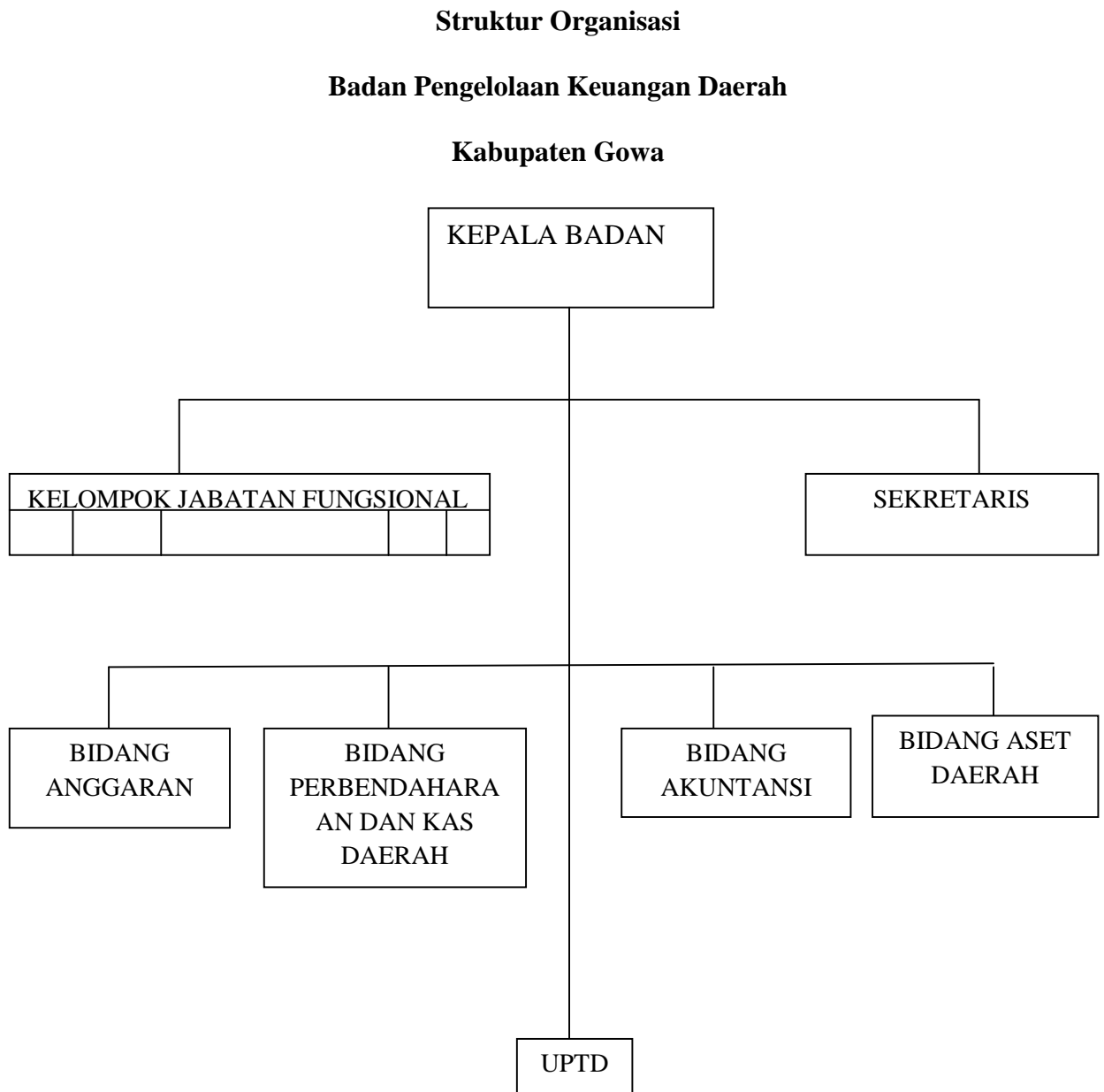
- a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.
- b. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada inter koneksitas anta rwilayah dan sektor.
- d. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan
- e. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.

### 3. Tujuan

- a. menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran
- b. meningkatkan pendapatan per kapita
- c. mendorong pertumbuhan nilai investasi
- d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan opini BPK terhadap laporan keuangan
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama
- f. Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif.



### C. Struktur Organisasi



#### **D. Job Description**

**KEPALA BADAN KEUANGAN** : merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**SEKRETARIAT** : merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyediakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

**BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH** : merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pendapatan Asli Daerah.

**BIDANG AKUNTANSI** : merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Akuntansi.

**BIDANG ANGGARAN** : merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Anggaran.

**BIDANG ASET DAERAH** : merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Aset Daerah.

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**: setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Kuesioner

Identitas responden adalah gambaran tentang kondisi atau keadaan narasumber yang menjadi obyek penelitian. Identitas responden dalam penelitian ini meliputi keadaan umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.

##### 1. Umur Responden

Umur juga menentukan kemampuan seorang untuk bekerja, termasuk bagaimana dia merespon stimulus yang dilancarkan individu/pihak lain. Berdasarkan penelitian dari hasil jawaban kuesioner responden pegawai BPKD berkisar antara 20-50 tahun. Jumlah responden kelompok umur dapat di lihat pada tabel 5.

Tabel 4.1. Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah (Orang)
20-29	2
30-39	16
40-49	10
50-59	6
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>

*Sumber: Data Diolah 2017*

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa sebanyak 2 orang berumur 20-29 tahun, 16 orang berumur 30-39, 10 orang berumur 40-49, dan sebanyak 6 orang yang berumur 50-59 tahun.

## 2. Jenis kelamin

Laki-laki dan perempuan memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda sehingga peran laki-laki dan perempuan berbeda disetiap bidangnya. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 4.2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin (L/P)	Jumlah(Orang)
Laki-laki	19
Perempuan	15
Jumlah	34

*Sumber: Data Diolah 2017*

Berdasarkan tabel 6 di ketahui bahwa Pegawai BPKD kabupaten gowa yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 19 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 15 orang.

### 3. Tingkat pendidikan

Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Responden Pegawai BPKD Kabupaten Gowa

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SMA/SMK	4
2.	Diploma	0
3.	Sarjana	30
Jumlah		34

*Sumber: Data Diolah 2017*

Berdasarkan tabel diatas di bahwa dari 34 orang responden pada pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah, tingkat SMA/SMK sebanyak 4 orang, tingkat Diploma nol responden artinya Pegawai BPKD tidak ada yang berpendidikan Diploma, dan sarjana sebanyak 30 orang.

Pendidikan sangat penting untuk dimiliki seseorang. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan mempermudah seseorang dalam melakukan aktifitas yaitu dalam mencari pekerjaan. Dengan adanya pendidikan seseorang akan memiliki kemampuan berfikir yang baik dan mudah mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi khususnya dalam hal penyusunan laporan keuangan dengan kemampuan dan keahlian di bidangnya yang di miliki oleh karyawan atau pegawai pada instansi dan perusahaan.

a. Statistik Deskriptif

Peneliti menggunakan tabel deskriptif pada tabel 5.1 di bawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

	<b>N</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Sum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>	<b>Variance</b>
<b>PERILAKU ORGANISASI</b>	<b>34</b>	<b>51</b>	<b>90</b>	<b>2476</b>	<b>72.82</b>	<b>7.602</b>	<b>57.786</b>
<b>SISTEM AKUNTANSI DAERAH</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>1009</b>	<b>29.68</b>	<b>2.625</b>	<b>6.892</b>
<b>Valid N (listwise)</b>	<b>34</b>						

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 16.00, 2017 (data diolah)

Dari tabel tersebut, berdasarkan jawaban dari 34 responden maka hasil pengukuran variabel Perilaku Organisasi mempunyai total jawaban seluruhnya berjumlah 2476 dengan jawaban terendah 51 dan jawaban tertinggi 90, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 72,82 dengan standar deviasi 7.602.

Hasil pengukuran variabel komitmen organisasi pada tabel terlihat, dari 34 responden diperoleh total jawaban seluruhnya 1009 dengan jawaban terendah 2 dan jawaban tertinggi 35, sehingga diperoleh skor jawaban responden mempunyai rata-rata 29,68 dengan standar deviasi 6,892.

### b. Hasil Uji Kualitas Data

Ada dua prosedur yang dilakukan untuk mengukur reliabilitas dan validitas, yaitu:

1. Uji reliabilitas dengan melihat koefisien (Cronbach) Alpha. “Nilai reliabilitas dilihat dari cronbachalpa masing-masing instrumen penelitian yaitu harus lebih besar dari pada 0,6” (Sekaran, 2000:39).
2. Uji validitas dilakukan dengan melihat “korelasi antara skor butir dengan skor faktor hams berkorelasi positif, kemudian membandingkan  $r$  tabel dengan  $r$  hitung dari tiap butir pertanyaan pada  $\alpha = 0,05$  dengan derajat kebebasan  $(n-k)$ ” (Santoso, 2000:41). Secara rinci hasil uji reliabilitas dan validitas disajikan pada lampiran 4 dan 5.

Dari hasil output *reliability* variabel perilaku organisasi pada lampiran tersebut, menunjukkan bahwa variabel perilaku organisasi adalah reliabel dengan cronbachalpa 0,941, yang berarti bahwa  $0,941 > 0,60$ . Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi.

Hasil tersebut juga menunjukkan data singkat dari delapan belas pertanyaan yang mencakup mean dan standar deviasi dari masing-masing butir, yang dilanjutkan dengan mean dan standar deviasi untuk keenam butir tersebut, yaitu **72.82** dan **7.602**.



**Tabel 5.2**  
**Validitas Instrumen Pertanyaan Perilaku Organisasi**

<b>Item</b>	<b><i>Corrected item total correation</i>(<math>r_{hitung}</math>)</b>	<b><math>r_{tabel}</math></b>	<b>Keterangan</b>
Pertanyaan 1	0.788	0,349	Valid
Pertanyaan 2	0.489	0,349	Valid
Pertanyaan 3	0.855	0,349	Valid
Pertanyaan 4	0.642	0,349	Valid
Pertanyaan 5	0.659	0,349	Valid
Pertanyaan 6	0.703	0,349	Valid
Pertanyaan 7	0.749	0,349	Valid
Pertanyaan 8	0.639	0,349	Valid
Pertanyaan 9	0.681	0,349	Valid
Pertanyaan 10	0.734	0,349	Valid
Pertanyaan 11	0.851	0,349	Valid
Pertanyaan 12	0.516	0,349	Valid
Pertanyaan 13	0.716	0,349	Valid
Pertanyaan 14	0.632	0,349	Valid
Pertanyaan 15	0.758	0,349	Valid

Pertanyaan 16	0.500	0,349	Valid
Pertanyaan 17	0.667	0,349	Valid
Pertanyaan 18	0.695	0,349	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 16.00, 2017 (data diolah)

Kolom *Corrected Item Total Correlation* merupakan korelasi antara skor item dengan total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. Untuk menguji validitas, butir pernyataan tersebut harus dibandingkan dengan  $r_{\text{tabel}}$  pada  $\alpha = 0,05$  dengan derajat kebebasan. Pada signifikansi 5% dengan derajat bebas  $df = 32$ , jumlah (kasus - k),  $r_{\text{tabel}}$  sebesar 0,349. Berdasarkan gambar pada tabel 5.2 terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena  $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$  pada taraf signifikansi 5%.

**Tabel 5.3**

**Validitas Instrumen Pertanyaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

<b>Item</b>	<b><i>Corrected item total correlation</i>(<math>r_{\text{hitung}}</math>)</b>	<b><math>r_{\text{tabel}}</math></b>	<b>Keterangan</b>
Pertanyaan 1	0.303	0,349	Valid
Pertanyaan 2	0.819	0,349	Valid
Pertanyaan 3	0.587	0,349	Valid
Pertanyaan 4	0.787	0,349	Valid

Pertanyaan 5	0.588	0,349	Valid
Pertanyaan 6	0.863	0,349	Valid
Pertanyaan 7	0.810	0,349	Valid

*Sumber* :Hasil Pengolahan *Data Primer dengan SPSS 16.00*, 2017 (data diolah)

Selanjutnya, output realibility menunjukkan hasil dari proses validitas untuk variabel perilaku organisasi. Berdasarkan gambar pada tabel 5.3 terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5%.

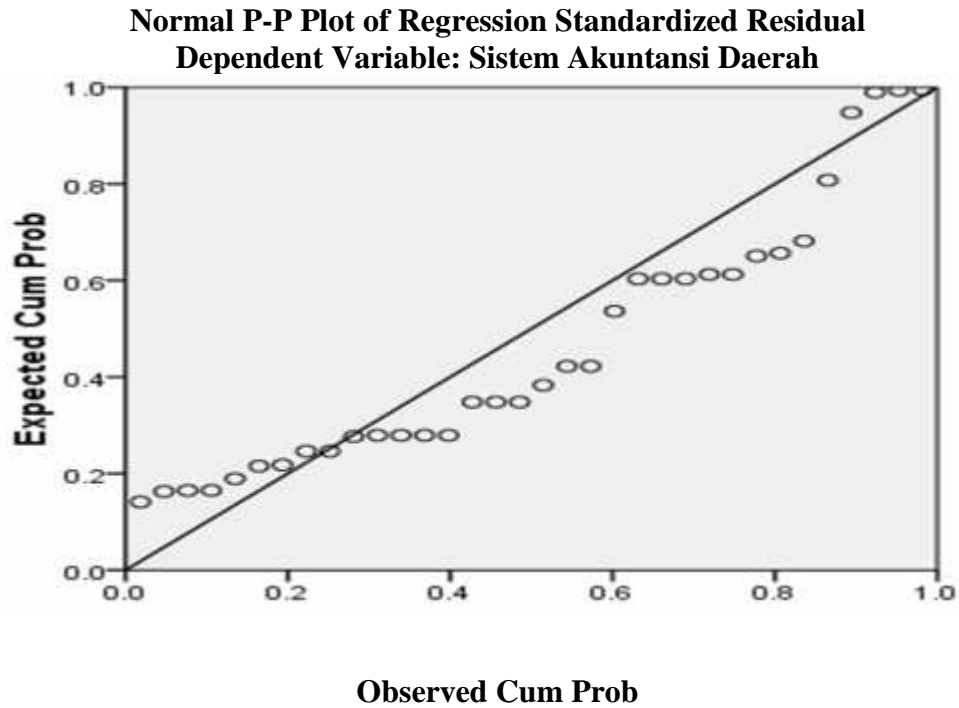
Berdasarkan hasil output *reliability* variabel sistem keuangan daerah dapat diketahui bahwa variabel tersebut reliabel dengan cronbach alpha adalah 0,876 yang berarti  $0,876 > 0,60$ . Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil tersebut juga menunjukkan data singkat dari kesembilan butir pertanyaan yang mencakup mean dan standar deviasi untuk kesembilan butir tersebut, yaitu 29.68 dan 2.625.

c. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

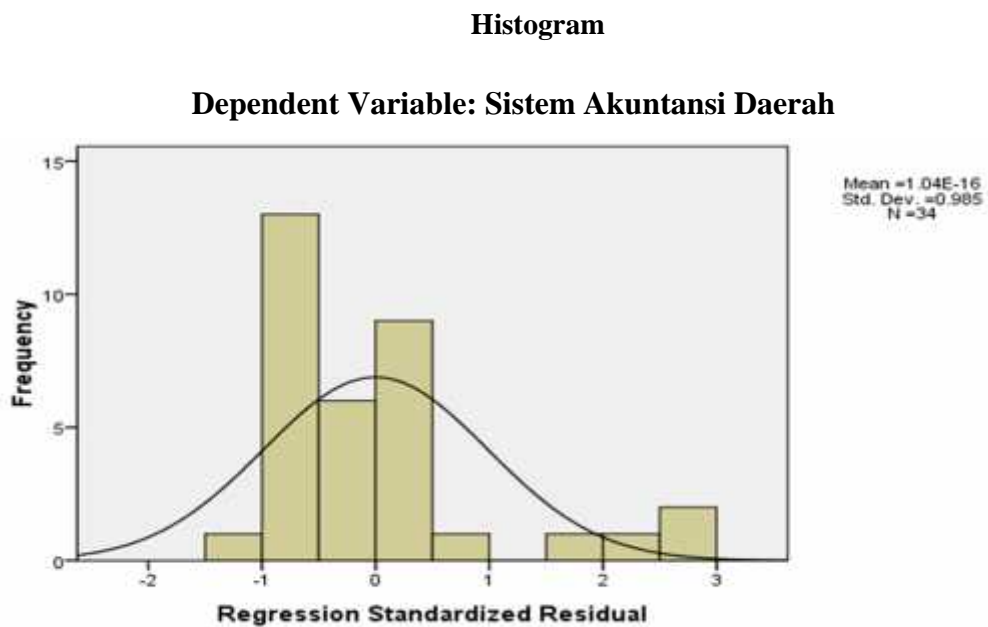
Uji normalitas dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dapat juga dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, demikian sebaliknya.

Pada penelitian ini hasil pengolahan data menampilkan grafik normal, plot yang ada menunjukkan titik menyebar sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, demikian juga dengan grafik histogram memberikan pola distribusi normal. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksikan Perilaku Organisasi berdasarkan masukan variabel independennya yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.



Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 16.00, 2017 (data diolah)

Gambar 5.1 : Normal P-Plot



Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 16.00, 2017 (data diolah)

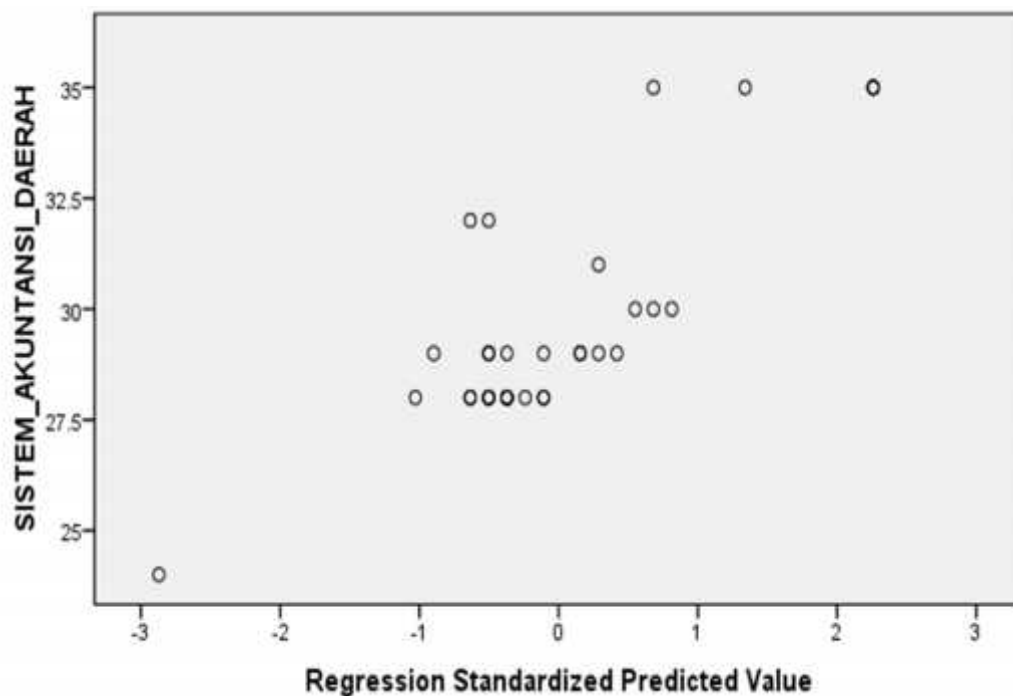
Gambar 5.2 : Histogram

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SREISD dan ZPRED dimana dasar analisisnya adalah :

1. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar kemudian menyempit maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Scatterplot**  
**Dependent Variable: Sistem Akuntansi Daerah**



Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 16.00, 2017 (data diolah) Gambar

5.3 : Scatterplot

Dari grafik Scatterplot penelitian ini terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (lampiran 4), sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Perilaku Organisasi berdasarkan masukan variabel independennya (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah).

e. Hasil Pengujian Hipotesis

**Tabel 5.5**  
**Variables Entered/Removed<sup>P</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PERILAKU_ORGANISASI <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: SISTEM\_AKUNTANSI\_KEUANGAN\_DAERAH

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 16.00, 2017 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 5.5 *variables Entered Removed* menunjukkan analisis statistik deskriptif yaitu sebagai berikut:

- Variabel yang dimasukkan kedalam persamaan adalah variabel independen yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- Tidak ada variabel dependen yang dikeluarkan (*removed*).
- Metode yang digunakan untuk memasukkan data yaitu metode *enter*.

**Tabel 5.6**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.832 <sup>a</sup>	.693	.683	1.478	.693	72.080	1	32	.000

a. Predictors: (Constant), PERILAKU\_ORGANISASI

b. Dependent Variable: SISTEM\_AKUNTANSI\_KEUANGAN\_DAERAH

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 12.00, 2007 (data diolah)

Dari tabel model summary di atas dapat kita lihat hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,832 yang berarti bahwa hubungan antara perilaku organisasi dengan sistem akuntansi daerah mempunyai hubungan yang kuat yaitu sebesar 83,2%. Dikatakan kuat, karena angka tersebut di atas 0,5 atau di atas 50%. Sedangkan nilai R Square atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,693. Yang berarti bahwa variabel independen (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) mampu dijelaskan oleh variabel independent (Perilaku Organisasi) sebesar 69,3%, dan selebihnya 30,7% (100% - 69,3%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.



Tabel 5.7

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	157.513	1	157.513	72.080	.000 <sup>a</sup>
Residual	69.928	32	2.185		
Total	227.441	33			

a. Predictors: (Constant), PERILAKU\_ORGANISASI

b. Dependent Variable: SISTEM\_AKUNTANSI\_KEUANGAN\_DAERAH

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 16.00, 2017 (data diolah)

Dari uji ANOVA atau F test, didapat F hitung adalah 72,080 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena profitabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi Sistem Akuntansi Keuangan daerah. Atau bisa dikatakan bahwa perilaku organisasi berpengaruh terhadap sistem akuntansi daerah.

Tabel 5.8

Coefficients<sup>3</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.747	2.478		3.529	.001
PERILAKU_ORGANISASI	.287	.034	.832	8.490	.000

a. Dependent Variable: SISTEM\_AKUNTANSI\_KEUANGAN\_DAERAH

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 16.00, 2017 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada 4.15 pada kolom *Unstandardized Coefficients* bagian B diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{Sistem Akuntansi Daerah} = 8,747 + 0,287$$

**(Perilaku Organisasi)**

Konstanta sebesar 8,747 menyatakan bahwa jika tidak ada perilaku organisasi, maka sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebesar 9.034

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada data diatas diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Pada kolom signifikan, konstanta dan variabel independen (perilaku organisasi) mempunyai angka signifikan di bawah 0,05 yaitu 0,000 Hal ini menunjukkan bahwa model regresi sudah layak untuk memprediksi pengaruh perilaku organisasi terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

Dengan demikian hasil penelitian ini menerima hipotesis, yang berarti perilaku organisasi berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Dari hasil penelitian juga didapat bahwa pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, perilaku organisasi berpengaruh positif terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Artinya, semakin tinggi perilaku organisasi maka akan semakin tinggi pula sistem akuntansi keuangan daerah.

Dari penelitian ini dihasilkan juga bahwa para pegawai di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tergolong pada manusia Y, yaitu manusia baik menurut Teori X dan Y dari Mc Gregor. Dimana para karyawan menikmati pekerjaannya, bersedia memberi kontribusi, bersedia menerima tanggung jawab, dapat membuat keputusan bagi diri sendiri, mampu membuat rencana-rencana jangka panjang dan mencapainya.

## **B. Pembahasan**

Dari grafik Scatterplot penelitian ini terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (lampiran 4), sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Perilaku Organisasi berdasarkan masukan variabel independennya (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah).

Dari tabel model summary dapat kita lihat hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,832 yang berarti bahwa hubungan antara perilaku organisasi dengan sistem akuntansi daerah mempunyai hubungan yang kuat yaitu sebesar 83,2%. Dikatakan kuat, karena angka tersebut di atas 0,5 atau di atas 50%. Sedangkan nilai R Square atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,693.

Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikan perilaku organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai angka signifikan di bawah 0,05 yaitu 0,000 Hal ini menunjukkan bahwa model regresi sudah layak untuk memprediksi pengaruh perilaku organisasi terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil penelitian ini perilaku organisasi berpengaruh positif terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Artinya, semakin tinggi perilaku organisasi maka akan semakin tinggi pula sistem akuntansi keuangan daerah.

Dari uji ANOVA atau F test, didapat F hitung adalah 72,080 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena profitabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi Sistem Akuntansi Keuangan daerah. Atau bisa dikatakan bahwa perilaku organisasi berpengaruh terhadap sistem akuntansi daerah.

Dengan demikian hasil penelitian ini menerima hipotesis, yang berarti perilaku organisasi berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Dari hasil penelitian juga didapat bahwa pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, perilaku organisasi berpengaruh positif terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Artinya, semakin tinggi perilaku organisasi maka akan semakin tinggi pula sistem akuntansi keuangan daerah.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: Faktor perilaku organisasi berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Semakin tinggi perilaku organisasi maka akan semakin tinggi pula sistem akuntansi keuangan daerah. Keperilakuan organisasi berperan untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

#### **A. Saran**

Adapun saran yaitu:

1. Pemerintah daerah perlu melibatkan para pegawainya terutama bagian keuangan dalam pengembangan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Diharapkan adanya partisipasi mereka mampu mengeliminasi keluhan-keluhan yang sering terjadi selama ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Andini, D., & Yusrawati. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan

- Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 24(Juni 2015), 65–82.
- Boyolali, D. I. K., & Wardoyo, A. N. (2012). Pengaruh keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di kabupaten boyolali.
- Juwita, R. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, 12(2), 201–214.
- Karyawan, P. K., & Pekanbaru, S. W. (2014). JURNAL EKONOMI Volume 22, Nomor 2 Juni 2014, 22, 138–150.
- Nurlaela, S., & Rahmawati. (2010). Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Subosukawonosraten. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.
- Organisasi, F. P., Kognitif, K., Konflik, A., & Akuntansi, S. (2011). Faktor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan konflik kognitif dan konflik afektif sebagai, 10(3), 193–203.
- Sahusilawane, W. (2017). Pengaruh Pelatihan Dan Kejelasan Tujuan Dalam Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Kasp. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, (59).
- September, W. P. (2013). Wisuda Periode September 2013, (September).
- Surakarta, U. M., & Keuangan, S. A. (n.d.). Pengaruh faktor keperilakuan organisasi dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.
- Sistem, K., Informasi, K., Dan, A., & Pengguna, K. (2013). Sang Ayu Nyoman Trisna Dewi 1 Fakultas Ekonomi Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional bertujuan untuk percepatan trans, 1, 196–214.
- Azlina, R. (2012). Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Kabupaten Karanganyar. *Naskah Publikasi*, 1–17.
- Ani, K., & Johan, A. (2016). Analisis Pengaruh Faktor Institusional Terhadap Minat Adopsi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.
- Andira, D. (2015). Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi.

- Angga, DP., (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Erlina, Omar, Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Penerbit Salemba Empat.
- Fatimah, (2013). Tujuan, K., Efektivitas, T., Informasi, S., & Daerah, A. K. PROGRAM STUDI AKUNTANSI Wisuda Periode Maret 2013 Pengaruh Pelatihan , Dukungan Manajemen Puncak Dan Kejelasan Tujuan.
- Himmah, B., (2011). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah Banyumas.
- Lyna, L, & Arifin, S. (2007). Faktor Keperilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1–30.
- Leina, Z., (2012). Pengaruh Faktor Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- Rahmat, H., (2015). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- Usman, & Lukman, P. (2014). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintah Daerah.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**





## KUISIONER PENELITIAN

### 1. Identitas/Karakteristik Responden

- Nomor Responden/KK :  
Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin : (P/L\*)  
Tingkat pendidikan : a. SMA  
b. Diploma  
d. Sarjana(S1)

### 2. Petunjuk pengisian :

- a. Isilah identitas responden dengan benar dan lengkap pada tempat yang telah disediakan.
- b. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban.
- c. Jawablah pertanyaan dalam kuesioner ini sesuai dengan apa yang Bapak/ Ibu/ Saudara/Saudari rasakan.

d. Cara mengisi jawab dengan cara memberitanda centang ( ) pada kolom:

⊗ Sangat Setuju (SS)

⊗ Setuju (S)

⊗ Kurang Setuju (KS)

⊗ Tidak Setuju (TS)

⊗ Sangat Tidak Setuju (STS)

e. Apabila Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari merasa jawaban yang telah dipilih kurang tepat, maka dapat diperbaiki dengan memberitanda sama dengan (=) pada jawaban yang dirasa kurang tepat tersebut, kemudian berilah tanda ( ) pada jawaban yang tepat.

Contoh:

SS	S	KS	T	STS
=				



## Kuesioner

X :PerilakuOrganisasi

<b>NO</b>	<b>PERNYATAAN</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>KS</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
1	Cara-carakerjaspesifiktelahtelahdijelaskan					
2	berbagaibidangketerampilankerjadipunyaipimpinan					
3	Kontribusiandakepadalembagamendapattanggapan yang menyenangkan					
4	Melaksanakanpekerjaandengankualitasbagusmembuatsayamerasadapatmengembangankemampuansaya.					
5	Tugas-tugas yang diberikantelahtidaktersebutkansehinggasetiappesawaidapatmengerjakannya					
6	Tujuansetiappekerjaan yang andakerjakandidefinisikandenganjelas.					

7	Prosedur antarakeuangan yang adaitidakbertentangandenganPermendagri No. 13 tahun 2006 danPermendagri No.59 tahun 2007 sertaprosedur yang disusunpejabatberwenangdaerah/Perda.					
8	Andatelahmengetahuibahwapekerjaanandaberkaitandengantujuankelompok/organisasi.					
9	Tingkat sasaranprestasi yang ingindicapaiolehorganisasisingattinggi.					
10	Terdapatkesetiakawananpadakelompokkerjaandamasing-masing salingmemberibantuan.					
11	Berbagaimasalah yang muncultelahdiberikanpemecahannyadenganeliti.					
12	Para pegawaipatuhdan loyal kepadapimpinan.					
13	Para pegawai selalumenekankanuntukdapatmelaksanakanpekerjaandengankualitas yang tinggi					
14	Para pegawai merasabebasanditidaktakutuntuktidakmenyetujui pendapatdantindakanatasan.					
15	Pimpinan menaruhkepercayaankepadaanda					
16	Andadiberikankebebasanuntukmendiskusikanberbagaimasalahdenganatasan.					
17	Pimpinan menyetujui pendapatdaninisiatifanda					
18	Atasanmemberikanwewenangkepadaandauntukmelakukanpekerjaanmenurutcaraanda.					



Y: Sistem Akuntansi Daerah

NO	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1	Pencatatan transaksi keuangan dalam jurnal selalum menggunakan bukti transaksi yang sah secara kronologis					
2	Posting dari jurnal ke buku besar dilakukan secara periodik (berkala)					
3	Paling lambat Laporan Realisasi semester 1 diserahkan ke PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) tidak lebih dari 10 hari setelah semester pertama tahun anggaran akhir.					
4	Laporan keuangan mendorong SKPD untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif					



5	Laporan keuangan yang baik mencerminkan tata kelola pemerintah yang baik					
6	Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran melalui laporan keuangan yang disusun telah berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007.					
7	Prosedur antar keuangan yang ada tidak bertentangan dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 serta prosedur yang disusun pejabat berwenang daerah/Perda					

## LAMPIRAN 1

### TABULASI HASIL PERILAKU ORGANISASI

NO	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	TOTAL
1	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	70
2	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	2	68
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	71
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	69
5	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	70
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	69
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	70
9	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	68
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	69
11	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	74
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	3	4	3	70
13	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	75
14	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	3	5	5	4	4	78
15	4	5	4	5	4	4	4	3	4	5	4	5	5	3	4	5	4	3	75
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	74
17	4	4	4	4	4	4		4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	65
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	76
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90
20	3	2	4	4	4	3	3	5	5	4	4	5	4	3	4	5	3	4	69
21	4	3	4	5	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	69
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72
25	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	83
26	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	77
27	4	3	4	4	3	5	4	4	4	5	4	4	4	2	4	3	3	2	66
28	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	72
29	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	3	4	79
30	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	68
31	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	78
32	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	70
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	69
34	3	4	2	3	4	2	3	3	2	2	2	4	2	2	3	4	3	3	51

**LAMPIRAN 2**  
**TABULASI HASIL KUESIONER SISTEM AKUNTANSI DAERAH**

<b>NO</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>
1	4	4	4	4	4	4	4	28
2	5	5	5	4	5	4	4	32
3	4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	5	4	4	4	4	29
5	5	4	4	4	4	4	4	29
6	4	4	4	4	4	4	4	28
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	4	4	4	4	4	4	4	28
9	4	4	4	4	4	4	4	28
10	4	4	4	4	4	4	4	28
11	4	4	4	4	5	4	4	29
12	4	4	4	4	4	4	4	28
13	4	4	4	5	5	5	4	31
14	5	4	4	4	5	4	4	30
15	3	4	5	4	5	4	4	29
16	4	4	4	4	5	4	4	29
17	4	4	4	4	4	4	4	28
18	5	4	4	4	4	4	4	29
19	5	5	5	5	5	5	5	35
20	4	5	4	5	5	5	4	32
21	5	5	3	4	4	4	4	29
22	5	5	5	5	5	5	5	35
23	5	5	5	5	5	5	5	35
24	4	4	4	4	4	4	4	28
25	5	5	5	5	5	5	5	35
26	5	4	4	4	5	4	4	30
27	4	4	5	4	4	4	4	29
28	4	4	4	4	4	4	4	28
29	5	4	4	4	5	4	4	30
30	4	4	4	4	4	4	4	28
31	5	5	5	5	5	5	5	35
32	4	4	4	4	5	4	4	29
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	5	3	3	2	4	3	4	24

## LAMPIRAN 3

### Reability Perilaku Organisasi

Scale: ALL VARIABLES

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	33	97.1
	Excluded <sup>a</sup>	1	2.9
	Total	34	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.941	.946	18

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
ITEM_1	4.06	.496	33
ITEM_2	4.09	.765	33
ITEM_3	4.12	.545	33
ITEM_4	4.27	.517	33
ITEM_5	4.06	.429	33
ITEM_6	4.06	.609	33
ITEM_7	4.03	.467	33
ITEM_8	4.15	.566	33
ITEM_9	4.21	.650	33
ITEM_10	4.24	.708	33
ITEM_11	4.18	.584	33
ITEM_12	4.33	.479	33
ITEM_13	4.09	.579	33
ITEM_14	3.70	.728	33
ITEM_15	4.12	.415	33
ITEM_16	3.97	.684	33
ITEM_17	3.79	.600	33
ITEM_18	3.58	.751	33

**Summary Item Statistics**

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.059	3.576	4.333	.758	1.212	.039	18
Item Variances	.356	.172	.585	.413	3.396	.017	18
Inter-Item Covariances	.167	.017	.367	.350	21.556	.004	18
Inter-Item Correlations	.494	.039	.910	.871	23.109	.023	18

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM_1	69.00	51.750	.788	.	.936
ITEM_2	68.97	51.655	.489	.	.943
ITEM_3	68.94	50.684	.855	.	.934
ITEM_4	68.79	52.547	.642	.	.938
ITEM_5	69.00	53.312	.659	.	.938
ITEM_6	69.00	51.125	.703	.	.937
ITEM_7	69.03	52.343	.749	.	.937
ITEM_8	68.91	52.085	.639	.	.938
ITEM_9	68.85	50.883	.681	.	.937
ITEM_10	68.82	49.778	.734	.	.936
ITEM_11	68.88	50.235	.851	.	.934
ITEM_12	68.73	53.767	.516	.	.940
ITEM_13	68.97	51.343	.716	.	.937
ITEM_14	69.36	50.551	.632	.	.939
ITEM_15	68.94	52.871	.758	.	.937
ITEM_16	69.09	52.210	.500	.	.942
ITEM_17	69.27	51.517	.667	.	.938
ITEM_18	69.48	49.695	.695	.	.937

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
73.06	57.621	7.591	18

**Hotelling's T-Squared Test**

Hotelling's T-Squared	F	df1	df2	Sig
139.076	4.090	17	16	.004

# Reability Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Scale: ALL VARIABLES

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	34	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	34	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.876	.887	7

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
ITEM_1	4.35	.544	34
ITEM_2	4.21	.479	34
ITEM_3	4.21	.538	34
ITEM_4	4.15	.558	34
ITEM_5	4.44	.504	34
ITEM_6	4.18	.459	34
ITEM_7	4.15	.359	34

**Summary Item Statistics**

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.239	4.147	4.441	.294	1.071	.013	7
Item Variances	.246	.129	.311	.182	2.407	.004	7
Inter-Item Covariances	.123	.016	.246	.230	15.333	.003	7
Inter-Item Correlations	.528	.055	.962	.907	17.550	.049	7

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM_1	25.32	5.801	.303	.510	.906
ITEM_2	25.47	4.923	.819	.738	.837
ITEM_3	25.47	5.166	.587	.596	.868
ITEM_4	25.53	4.681	.787	.958	.839
ITEM_5	25.24	5.276	.588	.417	.867
ITEM_6	25.50	4.924	.863	.966	.832
ITEM_7	25.53	5.408	.810	.822	.847

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
29.68	6.892	2.625	7

**Hotelling's T-Squared Test**

Hotelling's T- Squared	F	df1	df2	Sig
20.686	2.925	6	28	.024



# Perilaku Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

## Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
						Statistic	Statistic		
PERILAKU_ORGANISASI	34	39	51	90	2476	72.82	1.304	7.602	57.786
SISTEM_AKUNTANSI_DAERAH	34	11	24	35	1009	29.68	.450	2.625	6.892
Valid N (listwise)	34								

## Regression

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PERILAKU_ORGANISASI <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable:

SISTEM\_AKUNTANSI\_KEUANGAN\_DAERAH

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.832 <sup>a</sup>	.693	.683	1.478	.693	72.080	1	32	.000

a. Predictors: (Constant), PERILAKU\_ORGANISASI

b. Dependent Variable: SISTEM\_AKUNTANSI\_KEUANGAN\_DAERAH

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	157.513	1	157.513	72.080	.000 <sup>a</sup>
	Residual	69.928	32	2.185		
	Total	227.441	33			

a. Predictors: (Constant), PERILAKU\_ORGANISASI

b. Dependent Variable: SISTEM\_AKUNTANSI\_KEUANGAN\_DAERAH

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.747	2.478		3.529	.001
PERILAKU_ORGANISASI	.287	.034	.832	8.490	.000

a. Dependent Variable:

SISTEM\_AKUNTANSI\_KEUANGAN\_DAERAH

**CollinearityDiagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimensi on	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	PERILAKU_ORGANISASI
1	1	1.995	1.000	.00	.00
	2	.005	19.499	1.00	1.00

a. Dependent Variable:

SISTEM\_AKUNTANSI\_KEUANGAN\_DAERAH

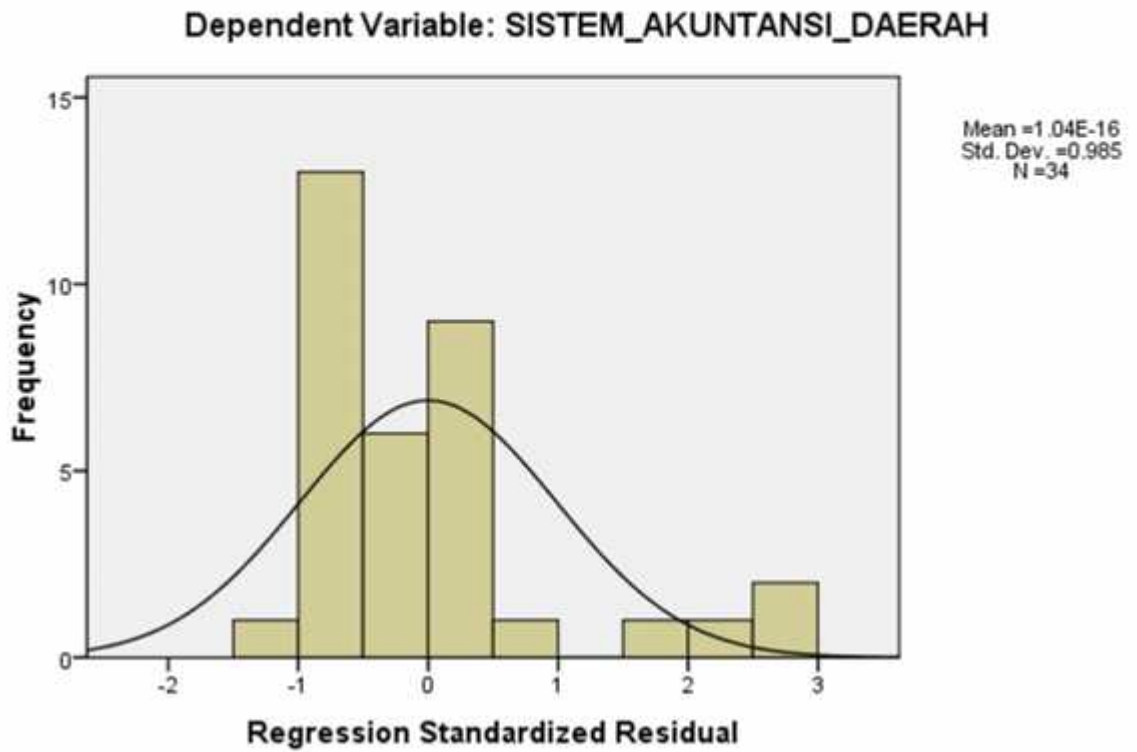
**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	23.40	34.61	29.68	2.185	34
Residual	-1.589	3.836	.000	1.456	34
Std. Predicted Value	-2.871	2.260	.000	1.000	34
Std. Residual	-1.075	2.595	.000	.985	34

a. Dependent Variable: SISTEM\_AKUNTANSI\_KEUANGAN\_DAERAH

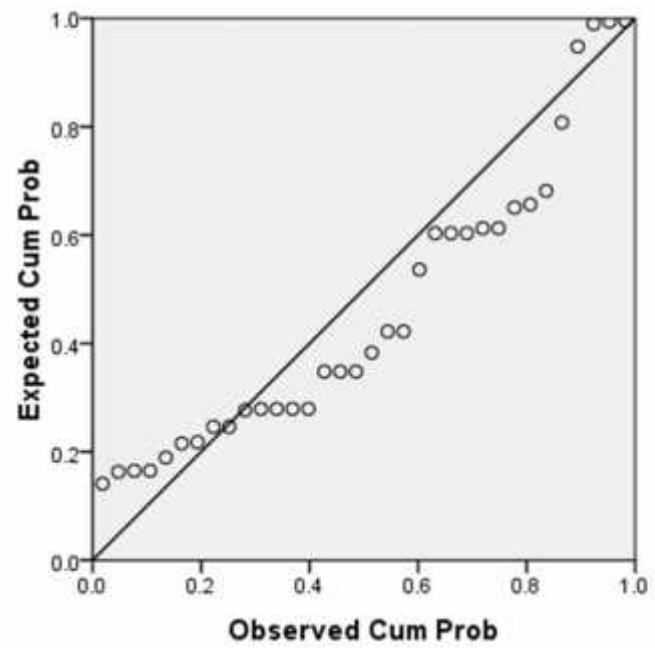
## Charts

**Histogram**



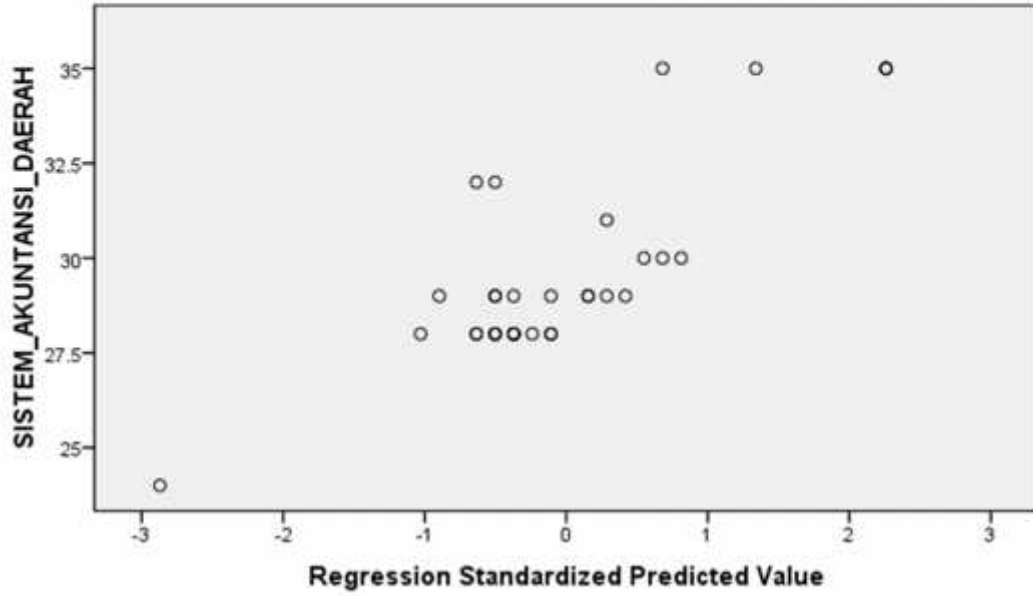
### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: SISTEM\_AKUNTANSI\_DAERAH



### Scatterplot

Dependent Variable: SISTEM\_AKUNTANSI\_DAERAH



## RIWAYAT HIDUP



**Musfirah Hasan**, lahir di Parang-parang Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 18 Juli 1995. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari Muh Hasan dan Syamsinar. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar di bangku SD Inpres Parang Beru Kabupaten Gowa Provinsi

Sulawesi Selatan pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2007.

Selanjutnya, Penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 02 Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama juga, Penulis melanjutkan pendidikannya ke MA Syekh Yusuf Sungguminasa Gowa Kabupaten Gowa dan Berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikannya ke Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi pada tahun 2013.

Berkat pertolongan Allah SWT, perjuangan dan kerja keras yang disertai iringan doa dari kedua orang tua dan saudara, perjuangan panjang Penulis dalam mengikuti pendidikan diperguruan tinggi dapat berhasil dengan terkhususnya skripsi ini.